

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN BERKARAKTER (UNTUK TINGKAT MADYA)

BAHAN CERAMAH SESPIMDAGRI

DISUSUN OLEH :

PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)

JAKARTA, JULI, 2010

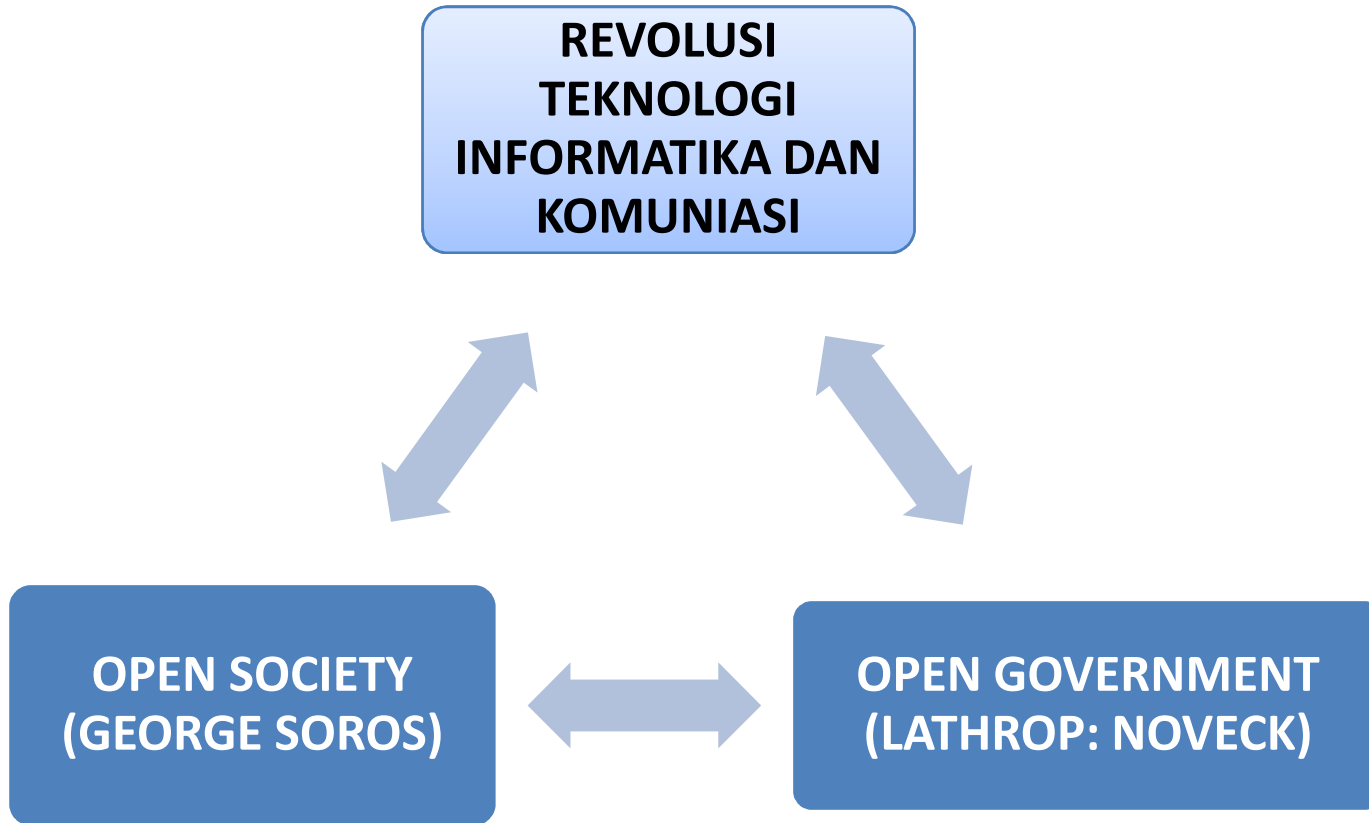
A. PENDAHULUAN

- Pada awal lahirnya peradaban , manusia merupakan mahluk pemburu yang solitair (penyendiri), yang kemudian berkembang menjadi “mahluk pembuat api” (*man as a fire making*).
- Dalam perkembangan selanjutnya , manusia kemudian menjadi mahluk sosial (*homo socius*) yang lebih lanjut berkembang menjadi manusia modern yang dikategorikan sebagai mahluk organisasi (HOMO ORGANISMUS).
- Ukuran modernitas manusia modern adalah keterlibatannya dalam organisasi. Semakin modern seseorang, dia akan semakin banyak terlibat dalam berbagai bentuk organisasi. Terlebih lagi pada era revolusi informatika dan komunikasi seperti saat ini.
- Pada masyarakat modern seperti sekarang ini, keanggotaan dalam suatu organisasi sudah bersifat lintas negara, sehingga mengarah sebagai warga dunia (*world citizen*), yang terikat pada kewarganegaraan dunia (*world citizenship*), melalui jaringan internet (netcitizen).

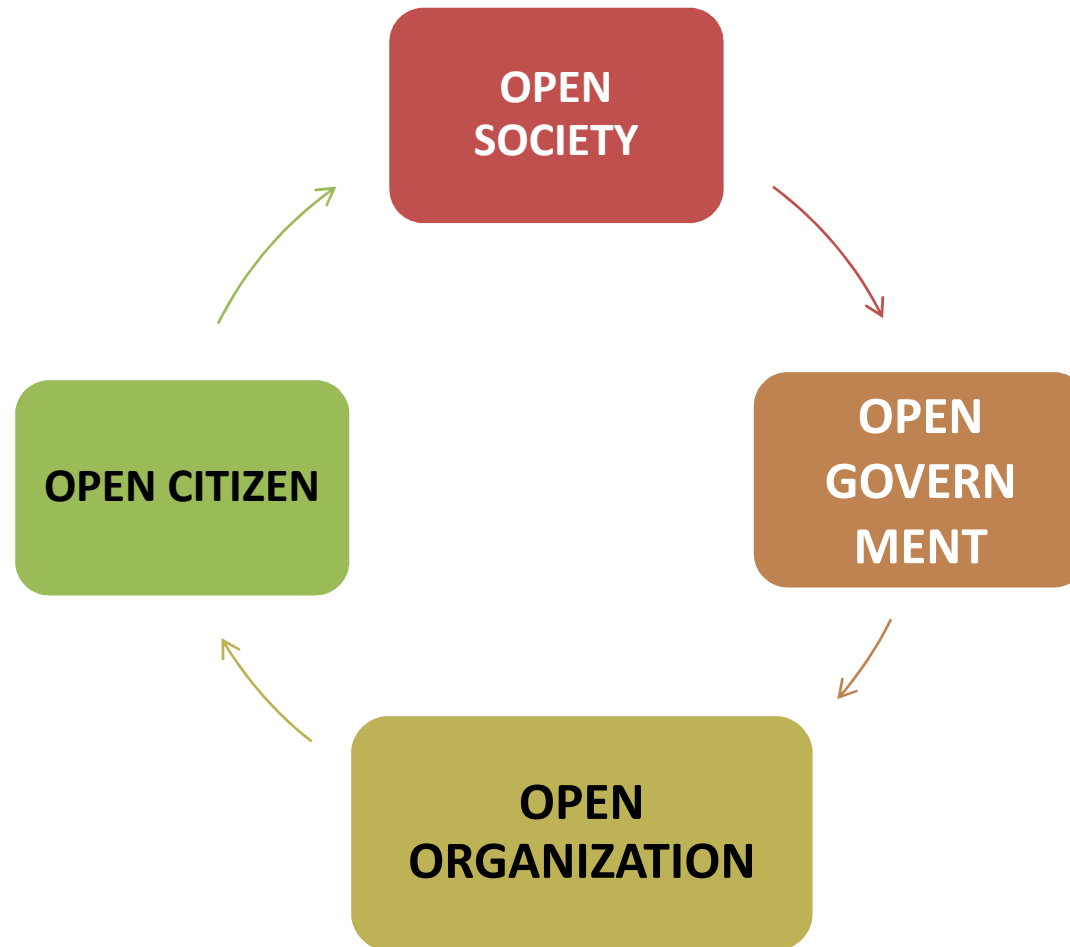
- Secara naluriah, pada setiap kelompok akan selalu ada pemimpinnya, yang muncul secara alamiah maupun melalui proses pengisian yang modelnya disepakati bersama oleh para anggota kelompok.
- Pada kelompok yang dibentuk secara sengaja dalam bentuk organisasi, dapat dibedakan antara organisasi yang berorientasi pada pemimpin (*leader orientation*), dan organisasi yang berorientasi pada sistem (*system orientation*).
- Pada organisasi berorientasi pada pemimpin, pemimpin memegang peran utama dalam kelompoknya. Pada masa lalu, raja, kepala desa, kepala suku merupakan **PRIMUS INTERPARES** (yang terutama dari yang utama), karena dia memegang semua posisi penting dalam masyarakat, yakni sebagai kepala pemerintahan, hakim perdamaian, ketua adat dlsb.
- Seiring dengan semakin luasnya pergaulan antar kelompok, terjadi proses pemencaran fungsi-fungsi, yang kemudian ditangani oleh beberapa orang. (lihat teori Fred W. Riggs tentang hal ini ataupun sejarah perkembangan pembagian kekuasaan yang semula absolut di tangan satu orang menjadi terbagi tiga – esekutif, legislatif dan yudikatif, seperti pandangan Trias Politica- nya Montesqieu).

- Pada masyarakat modern, organisasinya cenderung berorientasi pada sistem. Sistem dalam suatu organisasi disusun sedemikian rupa sehingga orang yang berada didalamnya dapat bekerja berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Mereka yang tidak sepakat dengan sistem akan terpentol ke luar atau berupaya mengubah sistem. Masyarakat modern mengarah pada terbentuknya *“Open social system”*.
- Pada organisasi modern peran pemimpin menjadi semakin terbatas, dia lebih diposisikan sebagai “conductor” dalam sebuah orkestra, yang bekerja dengan orang-orang profesional. Setiap anggota organisasi sudah tahu apa yang akan dikerjakan berdasarkan sistem yang sudah dipahaminya. Anggota organisasi lebih banyak diawasi oleh dirinya sendiri, bukan diawasi atau dimata-matai oleh atasannya.
- Gejala kepemimpinan muncul dalam kelompok.
- Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.

DAMPAK REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI



SIKLUS “OPEN SOCIAL SYSTEM”



Open Society

- **George Soros (2000) dalam bukunya berjudul “ *Open Society – Reforming Global Capitalism*”, mengemukakan perlunya dibangun sistem masyarakat kapitalis yang lebih terbuka. Pemikirannya dilatarbelakangi oleh adanya krisis keuangan global pada tahun 1997-1999.**
- **Melalui sistem masyarakat terbuka perlu disusun arsitektur keuangan global serta arsitektur politik global yang baru.**
- **Soros menyarankan adanya aliansi sistem masyarakat terbuka yang terdiri dari berbagai komponen antara lain komponen kerjasama pertahanan antar negara seperti NATO, komponen perdagangan yang diwadahi dalam WTO dibawah koordinasi oleh PBB untuk membangun masyarakat yang lebih egalitarian, menghargai hak asasi manusia serta memperhatikan kelestarian lingkungan.**

Open Government

- Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka (*Open Government*) dengan ciri utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun *electronic-government. (e-govt)*.
- Nixon et al dalam bukunya “Understanding E-Government in Europe-Issues and Challenges (2010) mengemukakan berkembangnya “ The Fifth Estate”, yakni kekuatan masyarakat yang berbasis pada IT, di luar press sebagai Fourth Estate, dan Parlemen sebagai Third Estate.
- Buku lain tulisan DANIEL LATHROP & LAUREL RUMA (AUTHOR), berjudul “ Open Government : Collaboration, Transparency, and Participation in Practice”, O’ Relly Media Inc. USA, (2010), mengemukakan karakteristik “open government” antara lain sangat intensif menggunakan teknologi informatika (e-govt), memberi perhatian pada kepentingan publik, transparan dalam merencanakan dan menggunakan dana publik, serta transparan dalam proses perumusan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan publik.

- * **BETH SIMONE NOVECK (author), 2009 dalam bukunya berjudul “*WIKI GOVERNMENT : How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful*”, menggunakan istilah Wiki Government untuk menggambarkan karakteristik keterbukaan pemerintah seperti terbukanya kamus digital “Wikipedia”.**

- **Douglas Holmes, dalam bukunya yang diterbitkan Tahun 1960 kemudian diperbaharui lagi tahun 2001 yang berjudul “*E-Gov – eBusiness Strategies for Government*”, telah memperkirakan berkembangnya smart communities akibat adanya teknologi informatika dan komunikasi, yang kemudian akan menciptakan model demokrasi baru yang dinamakan “*cyberdemocracy*”.**

- **Pada era digital seperti sekarang ini, ada 5 (lima) “estate”, yakni “sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas”. Kelima estate tersebut yaitu :**

1st estate : EXECUTIVE

2nd estate : JUDICATIVE

3rd estate : LEGISLATIVE

4th estate : PRESS

5th estate : NETCITIZEN → CYBERDEMOCRACY.

Open Organization

- Organisasi sebagai wadah dan sistem kerjasama antarmanusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya.
- Organisasi pemerintah yang terbuka (*open organization*) merupakan salah satu prasyarat untuk menjadi “*High Performance Government Organizations*”, sebagaimana dikemukakan Mark. G. Popovich (1998) (editor), dalam bukunya berjudul : “ *Creating High Performance Government Organizations*” (John Wiley & Sons, Inc, USA).
- Karakteristik “ High Performance Organizations” yaitu sbb:
 - *are clear on their mission;*
 - *define outcomes and focus on results;*
 - *empower employees;*
 - *motivate and inspire people to succeed;*
 - *are flexible and adjust nimbly to new conditions;*
 - *are competitive in terms of performance;*
 - *restructure work processes to meet customer needs.*
 - *maintain communication with stakeholders.* (Popovich, 1998 : 16).

DESIGN COMPONENTS OF HIGH PERFORMANCE ORGANIZATIONS

Design components	Traditional Organizations	High Performance Organizations
People	Narrow expertise Rugged individuals	Multiskilled Team Players
Decisions Systems	Centralized Closed	Dispersed OPEN
Human Resource Systems	Standarized selections Routine training Job-based pay Narrow, repetitive jobs	Realistic job interview Continuous training Performance-based pay Enriched jobs
Structure	Tall, rigid hierarchies Functional departments	Self-regulating teams Flat, flexible hierarchies Self-contained business
Values and Culture	Promote compliance Routine behaviors	Promote involvement Innovation, and cooperatives

Source : Popovich, 1998, p 22, citation from Resnick-West, 1994, p 34.

Open Citizen

- **ANDREW KAKABADSE, NADA KAKABADSE, KALU KALU (EDITORS), 2009,** dalam bukunya **“CITIZENSHIP : A REALITY FAR FROM IDEAL”**, menggambarkan adanya **CITIZENSHIP CONCEPTS** yang mencakup :
 - 1) *Political Citizenship***
 - 2) *Civil Citizenship***
 - 3) *Social Citizenship***
 - 4) *Economic Citizenship***
 - 5) *World Citizenship***
 - 6) *Virtual Citizenship***
- * Melalui konsep kewarganegaraan (***citizenship concept***) dibangun masyarakat yang terbuka dan yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara secara seimbang.

B. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

- Di kalangan pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yang perlu dijalankan secara bersama-sama yakni :
 - a. Kepemimpinan Organisasional;
 - b. Kepemimpinan Sosial

Ad.a. Kepemimpinan organisasional

- 1) Kepemimpinan ini muncul karena pimpinan pemerintah daerah maupun SKPD memimpin sebuah unit organisasi.
- 2) Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma-norma organisasi formal.
- 3) Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal biasanya menggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan, anggaran, personil dan logistik.
- 4) Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan administrasi publik.

Ad.b. Kepemimpinan Sosial

- 1) Timbul karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang
 - 2) Pada kepemimpinan sosial, kapasitas & kualitas pribadi si pemimpin yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin bersangkutan. Contoh : Kasus Aa Gym.
 - 3) Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif;
 - 4) Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala kepemimpinan sosial berasal dari Sosiologi, yang menekankan pada kharisma, gezag, serta sumber-sumber otoritasnya.
- Kepala Daerah termasuk pimpinan SKPD seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda.

**PERBANDINGAN ANTARA KEPEMIMPINAN ORGANISASIONAL
DENGAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN**

Nomor	Unsur Pembeding	Kepemimpinan Organisasional	Kepemimpinan Pemerintahan
1.	Pemimpin	Terbuka	Terbuka terbatas
2.	Pengikut	Merupakan bawahan (subordinate)	Ada dua macam pengikut yakni bawahan dan para pendukung
3.	Alat untuk menggerakkan pengikut	Instrumen manajemen seperti kewenangan, dana, logistik dlsb.	Selain instrumen manajemen, mutlak diperlukan kapabilitas pribadi pemimpin
4.	Hubungan pemimpin dengan pengikut	Ketat dan hierarkhis	Pada satu sisi ketat dan hierarkhis, pada sisi lain bersifat longgar dan heterarkhis.

MUNCULNYA PEMIMPIN

- Secara teoretis, munculnya seorang pemimpin, dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni :
 - a. Teori Genetis, yang berpandangan bahwa seorang pemimpin muncul karena dilahirkan oleh kelompok tertentu, dan sejak lahir sudah membawa talenta sebagai seorang pemimpin. (*Leader is born not made*).
 - b. Teori Sosial, yang berpandangan bahwa seorang pemimpin muncul karena disiapkan oleh masyarakat. (*Leader is made not born*).
 - c. Teori Eklektik, yang berpandangan bahwa seorang pemimpin muncul karena sudah memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dibawanya sejak lahir dan kemudian berkembang karena secara sosiologis diberi kesempatan oleh masyarakatnya. Teori eklektik sebenarnya perpaduan antara teori genetis dengan teori sosial.

EMPAT VARIABEL KEPEMIMPINAN VISIONER

Ada empat variabel yang mempengaruhi kepemimpinan visioner dalam pemerintahan yakni :

- 1. Pemimpin**
- 2. Pengikut**
- 3. Situasi dan kondisi**
- 4. Visi dan misi yang diembannya**

Variabel Pemimpinan

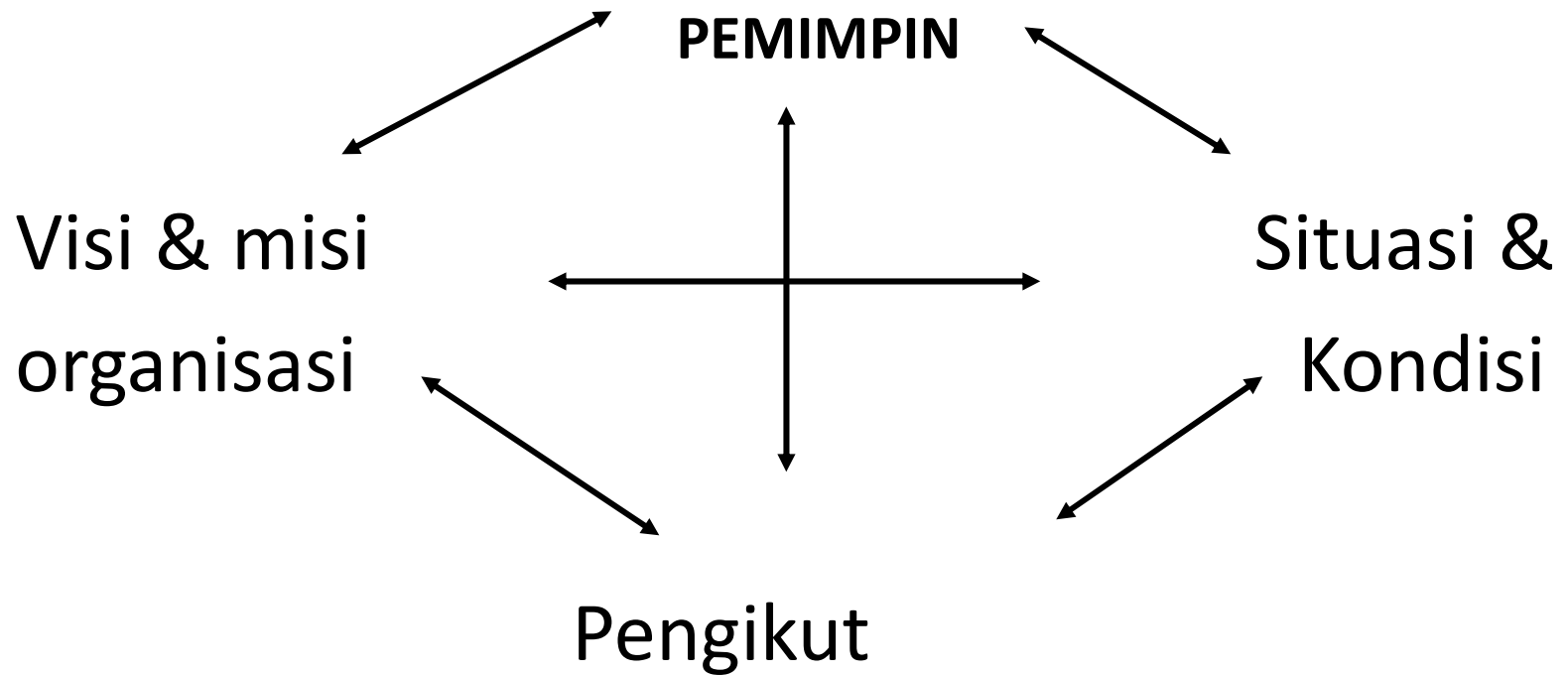
- **Pemimpin pemerintahan adalah orang yang tugas utamanya memimpin pengikut, baik sebagai bawahan maupun sebagai pendukung, melalui berbagai keputusan yang diambilnya.**

PEMIMPIN = Fungsi dari (BAKAT, KEMAMPUAN, KESEMPATAN)

- * **Bakat dapat dilihat melalui psikotest**
- * **Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau pelatihan**
- * **Kesempatan diberikan dan diperoleh melalui perjuangan baik secara sosiologis maupun secara politis. Pada saat sekarang kesempatan secara politis terbuka lebar. Seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal secara cepat.**

Contoh: Walikota Cilegon yang semula adalah Kepala Desa, atau Wakil Bupati Subang yang semula adalah ajudan Bupati periode sebelumnya.

Keterkaitan Antar Variabel Kepemimpinan



PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN

✓ Ada tiga variabel yang digunakan untuk memilih Pimpinan Pemerintahan sehingga mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, yakni :

1. Kapabilitas
2. Akseptabilitas
3. Kompatibilitas

ad. 1. Kapabilitas

Adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.

- ⊙ Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang.

ad. 2. Akseptabilitas

Adalah gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin, yang terlihat dari dukungan waktu pemilihan (untuk pejabat yang dipilih) serta dukungan program-program yang ditawarkan (untuk pejabat yang diangkat).

ad. 3. Kompatibilitas

Adalah gambaran kemampuan pemimpin pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintah tingkat atasnya dan kemampuan mengakomodasikan tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun dari para pengikutnya.

⊙ Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.

⇒ Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan

NO	Tingkatan Posisi Pemerintahan	Urutan Derajat Urgensi Aspek Kepemimpinan
1.	Presiden	1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas
2.	Kepala Daerah Propinsi	1. Kompatibilitas 2. Kapabilitas 3. Akseptabilitas
3.	Kepala Daerah K/K	1. Akseptabilitas 2. Kapabilitas 3. Kompatibilitas
4.	Kepala Desa	1. Akseptabilitas 2. Kompatibilitas 3. Kapabilitas

C. DEFINISI KEPEMIMPINAN

- Gejala kepemimpinan muncul dalam kelompok.
- Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.
- Secara substantif, dari waktu ke waktu definisi tentang kepemimpinan tidak mengalami perubahan yang berarti.
- Perubahan terpenting justru terletak pada konteks kepemimpinan.
- Bennis dan Nanus (2003 : 6) mengemukakan ada 3 konteks kepemimpinan yaitu :

COMMITMENT, COMPLEXITY, and CREDIBILITY (3C)

EMPAT HAL PENTING MENGENAI PEMIMPIN

- 1. Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut.**
- 2. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar.**
- 3. Bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang nyata memberikan teladan.**
- 4. Bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. (Sumber : Peter F. Drucker, 1997).**

Delapan Perbedaan Pemimpin dengan Manajer

- **Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi.**
- **Manajer tiruan, pemimpin adalah asli.**
- **Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan.**
- **Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpin memfokuskan pada orang.**
- **Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan pada rasa percaya.**
- **Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang**
- **Manajer menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, sedangkan pemimpin menanyakan “apa” dan “mengapa”.**
- **Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki pandangan pada horison. (Bennis & Townsend, 1995).**

- **Inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Sedangkan inti pengambilan keputusan adalah keberanian mengambil resiko, karena setiap keputusan yang diambil ataupun tidak diambil tetap ada risikonya.**
- **Pengambilan keputusan yang salah pada dunia usaha paling jauh akan membuat perusahaan bangkrut, sedangkan pengambilan keputusan yang salah pada pemerintahan akan berdampak sangat luas – dari mulai konflik pada skala kecil sampai perang, yang pada ujungnya dapat membuat sebuah negara mengalami kemunduran atau bahkan kebangkrutan.**
- **Pengambilan keputusan di bidang pemerintahan harus dilakukan “dengan kepala dingin”, dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal secara komprehensif dan berkesinambungan.**

D. KARAKTER SEORANG PEMIMPIN

- **Pemimpin dalam berbagai bentuk organisasi memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut :**
 - 1) memiliki daya inovasi yang tinggi, karena ciri utama seorang pemimpin adalah inovasinya;**
 - 2) memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya;**
 - 3) memiliki sifat konsisten antara ucapan dan perbuatannya;**
 - 4) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;**
 - 5) memiliki rasa dan daya untuk melindungi bawahannya ataupun pengikutnya;**
 - 6) memiliki rasa dan daya untuk mengembangkan bawahannya ataupun pengikutnya;**

KARAKTER PEMIMPIN PEMERINTAHAN

- **Selain harus memiliki keenam karakter kepemimpinan yang berlaku secara umum, kepemimpinan dalam bidang pemerintahan perlu ditambah dengan beberapa karakter lainnya yakni :**
 - 7) memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - 8) memiliki semangat nasionalisme yang luas;**
 - 9) memiliki loyalitas terhadap atasan secara positif;**
 - 10) memiliki semangat memelihara jiwa korsa (esprit de'corps) dalam arti yang positif;**

21 HUKUM KEPEMIMPINAN DARI JOHN C. MAXWELL

- 1. HUKUM KATUP (Kemampuan Memimpin Menentukan Tingkat Keefektifan Seseorang)**
- 2. HUKUM PENGARUH (Ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh- Tidak lebih, tidak kurang)**
- 3. HUKUM PROSES (Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan hanya dalam satu hari)**
- 4. HUKUM NAVIGASI (Siapapun dapat mengemudikan kapalnya, namun hanya pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya)**
- 5. HUKUM E.F. HUTTON (Jika pemimpin sejati berbicara, orang akan mendengarkan).**
- 6. HUKUM LANDASAN YANG MANTAP (Kepercayaan adalah landasan dari kepemimpinan)**
- 7. HUKUM KEHORMATAN (Orang dengan sendirinya mengikuti pemimpin-pemimpin yang lebih kuat daripada dirinya)**

- 8. HUKUM INTUISI (Para pemimpin mengevaluasi segalanya dengan intuisi seorang pemimpin)**
- 9. HUKUM DAYA TARIK (Siapa anda sesungguhnya menentukan siapa yang tertarik kepada anda)**
- 10. HUKUM HUBUNGAN YANG BAIK (Seorang pemimpin akan terlebih dahulu menyentuh hati baru minta tolong)**
- 11. HUKUM LINGKUNGAN SEPERGAULAN (Potensi seorang pemimpin ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengannya)**
- 12. HUKUM PEMBERDAYAAN (Hanya pemimpin yang mapanlah yang memberikan kekuatan kepada orang lain)**
- 13. HUKUM REPRODUKSI (Dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengangkat seorang pemimpin)**
- 14. HUKUM KEPERCAYAAN (Orang percaya dulu kepada Sang pemimpin, baru visinya)**

- 15. HUKUM KEMENANGAN (Para pemimpin mencari jalan agar timnya menang)**
- 16. HUKUM MOMENTUM BESAR (Momentum adalah sahabat terbaik seorang pemimpin)**
- 17. HUKUM PRIORITAS (Para pemimpin memahami bahwa kegiatan belum tentu berarti prestasi)**
- 18. HUKUM PENGORBANAN (Seorang pemimpin harus rela berkorban demi peningkatan)**
- 19. HUKUM WAKTU YANG TEPAT (Kapan harus memimpin adalah sama pentingnya dengan apa yang harus diperbuat dan harus menuju ke mana)**
- 20. HUKUM PERTUMBUHAN YANG EKSPLOSIF (Untuk menambah pertumbuhan, pimpinalh para pengikut- untuk melipatgandakan, pimpinalh pemimpin-pemimpin)**
- 21. HUKUM WARISAN (Nilai langgeng seorang pemimpin diukur dari suksesinya).**

(Sumber : John C. Maxwell, 2001. The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Interkasara Jakarta).

E. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN BERKARAKTER

- Berdasarkan karakteristik pemimpin pemerintahan, maka kepemimpinan pemerintahan yang berkarakter akan ditentukan oleh tiga hal yakni :

- 1) The most effective leaders are always investing in strengths;*
- 2) The most effective leaders surround themselves with the right people and then maximize their team;*
- 3) The most effective leaders understand their follower's needs”*

(Sumber : Tom Rath and Barry Conchie; 2008. *Strengths Based Leadership – Great Leaders, Teams, and Why People Follow*; Gallup Press, New York. USA. Page 2-3).

- **Selain karakteristik kepemimpinan secara umum sebagaimana dikemukakan di atas, kepemimpinan pemerintahan memiliki tambahan karakteristik :**
 - 1) menjunjung tinggi filosofi bangsa dan negara;**
 - 2) memperhatikan karakteristik pengikut serta situasi dan kondisi lingkungan internal maupun internalnya, sehingga lebih banyak menjalankan kepemimpinan situasional. (lihat pandangan Hersey dan Blanchard).**
 - 3) memperhatikan visi dan misi organisasi yang dipimpinnya, sehingga menggambarkan kepemimpinan yang visioner (lihat pandangan Burt Nanus).**

F. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN BERBASIS KEPAMONGPRAJAAN

- **Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seringkali disebutkan mengenai kepomongprajaan dan kepemimpinan pemerintahan berbasis kepomongprajaan. Tetapi masih banyak pihak yang meragukan pengertian dan makna dari kepomongprajaan.**
- **Dari waktu ke waktu persepsi orang tentang kepomongprajaan semakin menurun, terlebih lagi apabila nama tersebut dikaitkan dengan Satpol PP yang sekarang sedang dalam keadaan terpuruk, karena terjadinya banyak kasus di berbagai wilayah di Indonesia.**
- **Pertanyaannya adalah, apakah ada kepemimpinan pemerintahan berbasis kepomongprajaan?**

REDEFINISI KORPS PAMONG PRAJA

- **Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai titik nadir setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat sangat desentralistik, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi sangat dibatasi di daerah. Fungsi dekonsentrasi dibatasi hanya pada tingkat provinsi saja.**
- **Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan desentralisasi tersebut, maka definisi tentang Pamong Praja perlu disusun ulang. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada lagi pengertian Tugas Pemerintahan Umum, yang ada istilah baru yakni TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (TUP), yang isinya berbeda dengan pengertian TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU) yang selama ini digunakan.**
- **Dalam pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua pengertian TUP, yakni yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 19 Tahun 2008.**

- **TUP menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 adalah tugas kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, diluar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Sedangkan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008, Camat juga melaksanakan TUP dengan isi yang berbeda dibandingkan TUP yang diatur pada PP Nomor 3 Tahun 2007.**
- **Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan Pamong Praja dan siapakah yang termasuk ke dalam Korps Pamong Praja itu? Apakah mereka yang menjalankan Tugas Umum Pemerintahan?**
- **Dilihat secara etimologis, Pamong Praja adalah mereka yang bertugas “mengemong” negara atau bangsa Tugas mengemong artinya mencakup aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi, memberdayakan.**
- **Apabila cakupan itu yang akan digunakan, maka yang masuk ke dalam Korps Pamong Praja menjadi sangat luas, karena dapat mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah.**

- **Siapa yang masuk kategori Korps Pamong Praja? Jawabannya adalah mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya.**
- **Masuk dalam kategori ini adalah para Lurah, Camat, Polisi Pamong Praja, Asisten Sekda, serta Sekretaris Daerah, ditambah dengan SKPG (Satuan Kerja Perangkat Gubernur) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010.**

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :**
- a. Kerjasama antar daerah;**
 - b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;**
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;**
 - d. Pembinaan batas wilayah;**
 - e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;**
 - f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;**
 - g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan**
 - h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (Pasal 6 PP Nomor 3 Tahun 2007.**

Camat menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;**
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;**
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;**
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;**
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan**
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (Pasal 15 ayat 1 PP Nomor 19 Tahun 2008).**

KODE ETIK KEPAMONGPRAJAAN

- **Sebagai korps yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang surutnya politik pemerintahan daerah, Pamong Praja telah memiliki kode etik (*code of conduct*) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti, yang artinya Delapan Nilai Pegangan Untuk Berbakti.**
- **Kode Etik ini sebenarnya merupakan pegangan moral bagi siapapun yang masuk kategori Korps Pamong Praja.**
- **Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen moral. Tetapi kelemahan bangsa Indonesia, banyak membuat komitmen tetapi seringkali tidak konsisten.**

HASTA BUDI BHAKTI

(KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA)

- 1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.**
- 2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.**
- 3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin.**
- 4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif.**

- 5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.**
- 6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencari penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.**
- 7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.**
- 8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.**